

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Mengacu pada pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan Elit Tradisional di Desa Jawapogo hingga saat ini masih sangat kuat dan diakui keberadaannya baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah desa di Desa Jawapogo.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, pemerintah Desa Jawapogo sangat mengandalkan keterlibatan para Elit Tradisional sebagai motivator dalam mengarahkan dan memberi petunjuk kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan menyangkut pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Peranan Elit Tradisional di Desa Jawapogo benar – benar sebagai pemersatu masyarakat yang ditunjukkan dalam berbagai kegiatan upacara adat di Desa Jawapogo. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam upacara – upacara adat, baik upacara membangun rumah adat, upacara pernikahan maupun upacara kematian.

##### **6.1.1 Kemitraan Sesuai Prinsip Kesetaraan (*Equity*)**

Berdasarkan hasil analisis prinsip kesetaraan artinya harus ada pendekatan bukan secara top down ataupun bottom up. Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emosional saling membutuhkan dan melengkapi. Di Desa Jawapogo sudah terbukti bahwa setiap kemitraan harus ada suatu institusi yang telah bersedia menjalin hubungan kemitraan yang sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat juga yang datangnya dari masyarakat sendiri dimana masyarakat bergotong royong dan berpartisipasi dalam suatu pembangunan. Bekerja sama dari pihak – pihak masyarakat dan elit akan sangat dibutuhkan sehingga membawa begitu banyak perubahan – perubahan.

### **6.1.2 Prinsip Keterbukaan**

Berdasarkan hasil analisis di Desa Jawapogo Kepala Desa melakukan dengan cara memberi ruang kepada masyarakat untuk berpendapat, dengan cara komunikasi agar masyarakat juga peka terhadap pelaksanaan pembangunan desa juga melakukan pertemuan – pertemuan khusus dengan para Mosanua. Untuk memperkuat kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat dengan cara duduk bersama atau minta pendapat/ide – ide dari para Mosanua. Kepala desa juga jangan membuat keegohan tersendiri sehingga membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam program – program desa. Tetapi yang dialami di Desa Jawapogo kepala desa selalu mendengarkan masyarakat dan memberi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat dan memberikan masukan atau usul saran. Dan bahwa pemerintah sangat membutuhkan elit tradisional setiap adanya suatu pembangunan dalam menggerakkan masyarakat karena yang lebih dekat dengan masyarakat adalah Mosanu untuk memotivasi mereka dalam setiap aktifitasnya.

### **6.1.3 Prinsip Asas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)**

Berdasarkan hasil analisis tentang asa manfaat bersama (*mutual benefit*) suatu organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan yang terjalin sesuai dengan kemitraan yang diperoleh. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama yaitu harus saling menguntungkan dan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan menciptakan manfaat bersama agar menghindari persaingan diantar para mitra. Di Desa Jawapogo peran ketua adat dalam menyatukan masyarakat adalah dalam

berbagai hal upacara adat seperti membangun rumah adat, perkawinan dan juga kematian. Dalam upacara adat apapun para Mosanua tidak sendiri bekerja melainkan mengumpulkan semua warag masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi. Sehingga hubungan pemerintah dengan Mosanua selalu berjalan. Dalam hal ini pemerintah dengan Mosanua saling membutuhkan dalam pelaksanaan apa saja baik dalam penyelesaian masalah, pembangunan desa serta upacara – upacara adat lainnya.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa Kepala Desa lebih berdominan dalam menentukan kebijakan dan tidak melibatkan para Elit/Mosanua yang berakaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Pemerintah Desa Jawapogo harus selalu melibatkan para Elit Tradisional (*Mosanua*) dan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan harus selalu adanya membangun hubungan antar pemerintah, elit tradisional dan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat Desa Jawapogo tidak harus selalu tergantung pada mobilisasi yang datang dari para Elit Tradisional yang ada maupun dari pemerintah desa, maka perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Diharapkan perhatian dari pemerintah Desa Jawapogo untuk tetap menumbuhkan dan melestarikan nilai – nilai sosio budaya tradisional, khususnya di Desa Jawapogo agar tidak hilang atau punah akibat perkembangan jaman.
4. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi peranan elit tradisional sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Jawapogo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainillah, Siti Rohmatul. 2016. "Elite Politik Dalam Kontenstasi di Desa Dengan Menggunakan Studi Peran Blater Dalam Pilkades di Desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura" dalam *Jurnal Politik Muda*, Madura: Politik Muda.
- Anggraeny, Sri. "Relasi Kuasa Antar Aktor Intermediary dan Pemerintah DIY (Studi Kasus: Satunama Yogyakarta) dalam naskah Publikasi.
- Aso, Ermelinda. 2019. "Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dengan Mosalaki Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo" dalam *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Kupang: Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Asy'arie, Abdul Haris. 2005. *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak BenuaqKalimantan Timur*. Kalimantan Timur: Humas Pemprov.
- Bani, Kristoforus Beo. 2019. "Fungsi *Mosanua* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Ngalupolo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende" dalam *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Kupang: Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Daldjoeni N, dkk. 2004. *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan Desa*. Bandung. PT Alumni.
- Eko, Sutoro dkk. Desa Baru, Negara Lama, dalam Frans Tokan, dkk. Laporan Peneitian: Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala Desa, Elit Tradisional di Desa, Elit Tradisional di Desa Wetoone Kecamatan Withama Kabupaten Flores Timur, 2018.
- Febrianti, Ita. "Relasi Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Korporasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Kota Surabaya", <https://repository.unair.ac.id/105051>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 10.27.
- Haeruman. 1997. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Bappenas.

- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- HM, Nasaruddin Anshoriy, Ch. 2008. *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Jayadinata, J. T. dan Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kalaby, Dichyak Al. “Peran Elit Dalam Pembangunan Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro”, <https://repository.unair.ac.id/17603/3/3>, diakses pada 15 September 2021 pukul 21.21.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- KBBI Daring. “Politik Global dan Hegemoni”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elite>, diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 15.35.
- Keller , Suzanna. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peran Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khamdan, Ali. “Partnership Program System Trought Si Bule Albino Institutional Business By Mine Firm In Binuang District Kab. Tapin”, dalam Jurnal AdBispreneur. Banjarmasin: STIA Bina Banua Banjarmasin.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

- Lenggu, Terfena Adolfina. 2001. "Peran Elit Tradisional Sebagai Pendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wederok Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu" dalam *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Kupang: Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Manganang, Stefani. 2013. "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa" dalam *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Manganang, Stefani. 2013. "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pemerintahan di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa" dalam *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Masoed, Mochtar dkk. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Novita, Ayu. 2014. "Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kecamatan Sidoarjo" dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 3 Nomor 1* ( hal: 86-94). Banyuwangi: Universitas Airlangga
- Pareto, Vilfredo. 1982. *The Mind and Society* dikutip dari Bottomore, Tom B. *Elite Society*. New York: Penguin Books.
- Pareto, Vilfredo. 1982. *The Mind and Society* dikutip dari Bottomore, Tom B. *Elite Society*. New York: Penguin Books.
- Patton, Winardi. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek yayasan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 Tentang  
Kemitraan Usaha Peternakan

Prof. Drs. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Putnam, R. D. 1993. *The prosperous community: Social capital and public life*. American

Rahajeng, Mardatilla Septiani dkk. “Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan)” dalam *Jurnal Pengembangan Kota Volume 3 Nomor 2* (hal: 112-119). Semarang: Universitas Diponegoro.

Ramadhani, Niko. 2022. “Kemitraan Adalah: Pengertian, Jenis dan Beberapa Contohnya”,[https://www.akseleran.co.id/blog/kemitraan-adalah/#:~:text=Melansir%20dari%20Business%20Australian%20Government,gabungan%20\(incorporated%20limited%20partnership\)](https://www.akseleran.co.id/blog/kemitraan-adalah/#:~:text=Melansir%20dari%20Business%20Australian%20Government,gabungan%20(incorporated%20limited%20partnership)), diakses pada 14 Maret 2022.

Rostow, W.W. 1959. *The Stages of Economic Growth*, Source by *The Economic History Review*, New Series, published by Blackwell Publishing on behalf of Economic History Society.

Sanapiah Faisal. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sarwoto. 1981. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Shuda, I Nyoman. 2018. “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa”, dalam Frans Tokan, dkk, Laporan Penelitian: *Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala desa, Elit Tradisional, di Desa Wetoone Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur*.

- Siagian, P. S. 1991. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Silastri, Novia. 2017. “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singing” dalam *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol.IV, No.* Riau: Universitas Riau.
- Slamet. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press Jakarta.
- Soemantri, Bambang Trisanto. 2011. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soemantri, Bambang Trisanton. 2011. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soepomo, R. 1997. *Bab – bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudirwo . 1985. *Pokok – Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung : Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – UI.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto, Astrid S. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya sebuah Elite birokrasi*. Jakarta; Sinar Harapan.
- Syarifudin, Raden Qasim. *Peran Modal Sosial dalam Penanaman Nilai*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Taliziduhu, Ndraha. 1984. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. Unayah,

Nunung dkk. 2015. “Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas” dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial Volume 01 Nomor 02* (hal 121-140). Jakarta Timur: Kementerian Sosial RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **LAMPIRAN**



(Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Jawapogo 19 Oktober 2022)



(Wawancara dengan Bapak Aparat Desa 20 Oktober 2022)



(Wawancara dengan bapak Kepala Adat 21 Oktober 2023)



(Wawancara dengan Bapak Mosanua 21 Oktober 2023)



( Wawancara dengan Bapak Aparat Desa Jawapogo 22 Oktober 2023)



(Wawancara dengan Masyarakat Desa 23 – 24 Oktober 2022)